

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari adanya kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DEMANGAN GONDOKUSUMAN (Study atas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP))“, maka penulis merasa perlu untuk memberi batasan istilah dan maksud yang terkandung dalam judul tersebut. Adapun pengertian dari kata-kata ataupun istilah yang terdapat dalam judul diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan masyarakat miskin (*Empowerment Proverty of Society*) dalam hal ini adalah memahami berbagai potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya serta masyarakat /sekitarnya, mampu melihat dan mampu memperhitungkan berbagai peluang atau kesempatan yang ada di sekitarnya dan menggunakan kedua faktor tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan yang ada pada mereka (masyarakat) dan mengembangkan kehidupan yang serasi dan berkesinambungan.¹

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²

¹ Mulyanto Vidhyandika, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1996) hal. 142

² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta : CIDES, 1996) hal.140

Maksud dari pemberdayaan masyarakat miskin yaitu upaya BKM Demangan Gondokusuman dalam membangun daya yang dimiliki oleh masyarakat Demangan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman secara bergulir kepada masyarakat miskin dan melakukan pendampingan secara kontinyu, sehingga masyarakat berdaya dan mandiri.

2. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Demangan Gondokusuman

Adalah program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar nantinya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. Proyek ini menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Cara yang ditempuh oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu dengan menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis dan membangun pihak yang terlibat. Dana yang dipergunakan untuk modal usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan di bantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).

3. Kelurahan Demangan

Kelurahan Demangan merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Gondokusuman, jarak menuju pusat pemerintahan kecamatan hanya 0,5 Km dengan waktu tempuh dari kelurahan Demangan menuju kecamatan Gondokusuman sekitar 3 menit. Mayoritas penduduknya

bekerja sebagai pegawai baik negeri maupun swasta dan sebagian lagi sebagai wiraswasta. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dan seluruh pertanahannya berupa perumahan dan sebagian kebun kosong tidak ada areal persawahan.³

Berdasarkan penegasan judul tersebut maksud secara keseluruhan dari judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DEMANGAN GONDOKUSUMAN (Study Atas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP))”** adalah penelitian tentang pelaksanaan P2KP Demangan Gondokusuman Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan di perkotaan khususnya di kelurahan Demangan.

B. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sebenarnya sudah sejak semula diarahkan untuk mewujudkan pemerataan. Sebagaimana di kemukakan oleh GBHN “ Upaya mewujudkan rakyat agar makin adil dan merata harus ditingkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat melalui upaya-upaya pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makna serta manfaat pembangunan sehingga motivasi rakyat makin tergugah untuk berperan aktif dalam pembangunan.”⁴

³ Monografi Kelurahan Demangan 2004

⁴ Garis-garis Besar Haluan Negara, MPR, AS. Solo. 1996. hal. 64

Tapi mewujudkan pemerataan ternyata tidak semudah memacu pertumbuhan ekonomi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal Pelita I dapat di pacu dengan rata-rata 6,5 persen pertahun, kesenjangan perekonomian Indonesia justru cenderung semakin lebar. Perbandingan tingkat pendapatan antara 10 persen penduduk termiskin dengan 10 persen penduduk terkaya cenderung meningkat. Bila pada tahun 1970 perbandingan antara dua golongan pendapat tersebut masih sekitar 1 berbanding 6,5, maka pada tahun 1995 meningkat menjadi 1 berbanding 8,7.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sejak Pelita I harus diakui telah mendatangkan hasil yang cukup menggembirakan. Indikatornya antara lain tampak pada peningkatan pendapatan nasional perkapita dari Rp 307.267 pada tahun 1971 menjadi Rp 567. 786 pada tahun 1987.⁵ Namun demikian pembangunan ekonomi rakyat jangan hanya mengandalkan strategi pertumbuhan saja. Telah terbukti bahwa dampak kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, justru semakin memperlebar jurang kesenjangan.

Dalam keterpaduan pembangunan diperlukan adanya usaha, prakarsa, swadaya dan peran aktif dari masyarakat. Sedangkan aspek-aspek keterpaduan itu meliputi :

1. Terpadu sasaran yang hendak dicapai, yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 dan digariskan dalam GBHN Tahun 1999.

⁵ Dr. Gunawan Sumodiningrat. MEC, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hal. 13.

2. Terpadu lokasi kegiatannya atau wilayah kerjanya dengan mengutamakan daerah minus dan daerah yang padat penduduknya, baik daerah pedesaan maupun daerah perkotaan.
3. Terpadu penyelenggaraannya yang terdiri atas berbagai kegiatan sektoral, yang dilaksanakan pemerintah di dukung oleh prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat.⁶

Namun perlu juga disadari dan diketahui bahwa berbagai masalah atau kendala yang muncul atau sebagai dampak dari berbagai keberhasilan pembangunan yang dilalui selama ini juga masih ada yang belum teratasi, yang senantiasa memerlukan perhatian dari semua pihak untuk mengatasinya, yaitu masalah kemiskinan.


Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multi dimensi, yakni berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan sebagai realitas kehidupan selalu digambarkan sebagai suatu keadaan kehidupan yang kekurangan, lemah dan tidak bercukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat di sebabkan karena adanya ketidakadilan dalam permilikan faktor produksi dalam masyarakat. Pembagian faktor produksi yang tidak merata itu menyebabkan masyarakat pedesaan terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pemilik tanah dan kelompok yang tidak memiliki tanah.⁸

⁶ Sumadi Sutrijat, *Geografi I Untuk Sekolah Menengah Umum* (Jakarta : Depdikbud, 1996) hal.53

⁷ Dr. Musa Asy'ari, *Islam Etos kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : Lesfi, 1997) hal. 26

⁸Loekman Sutrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997) hal. 16.

 (6)

Kemiskinan akhir-akhir ini semakin meningkat khususnya di perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat desa yang pergi ke kota, untuk mencari pekerjaan karena di desa sudah tidak ada lagi tempat untuk mencari nafkah atau untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sementara di kota yang diharapkan bisa mengubah nasibnya sama saja, di kota sudah tidak ada lowongan pekerjaan sehingga mereka mencari pekerjaan apa saja untuk menetap di kota sampai ada perubahan. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan di perkotaan, karena adanya urbanisasi dari desa. Karenanya perlu adanya penanganan yang intens dan serius khususnya dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Sementara pemberdayaan masyarakat miskin yang sekarang banyak di gagas kurang mendapat respon oleh pihak pelaksana pembangunan. Di samping itu banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Dalam hal ini pelaksana pembangunan lebih menggunakan pada pendekatan pembangunan yang berasal dari atas kebawah (*Top Down*) dari pada pembangunan dengan pendekatan dari bawah (*Bottom Up*). Akibatnya banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

Disamping itu walaupun persentase kemiskinan menurun sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan sejak Pelita pertama, namun dilihat

secara absolut krisis moneter dan ekonomi yang melanda negara kita mulai tahun 1997 sampai sekarang ini telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut. Krisis tersebut telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di perkotaan. Karena itu krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi lagi dan diperkaya dengan upaya untuk memperoleh keberdayaan substitusi komunitas, agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.⁹

Karena itu untuk menangani kemiskinan di perkotaan di rancang suatu proyek yang diharapkan dapat lebih terjamin keberlanjutannya yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau *Urban Poverty Project*. Proyek ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan dan institusi lokal. Diharapkan kedua hal ini dinilai merupakan syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya secara berkelanjutan. Proyek ini menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh dengan menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis dan membangun pihak yang terlibat.

Dana yang dipergunakan untuk modal usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir yang diberikan kepada Kelompok Swadaya

⁹ Buku panduan P2KP ; 1999 : hal.1

Masyarakat (KSM) yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KSM). Pengelolaan seluruh kegiatan baik pengembangan usaha dan pengembangan prasarana dan sarana pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinan. Disamping itu badan ini mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama dengan baik dan bersama.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memadukan beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program penanggulangan kemiskinan terdahulu, khususnya yang di selenggarakan di wilayah perkotaan, seperti Kampung Improvement Program (KIP) dan Improvement Project (IVP), KIPMHT (Muhammad Husni Tamrin) III DKI dengan konsep Tribina, peremajaan kampung kumuh dengan pendekatan CBD (Community Based Development) dan P2BPK (Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok).

Kegiatan tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah meliputi kegiatan ekonomi yang antara lain kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan atau keluarga miskin yang menghimpun diri dalam suatu kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tidak ada batasan terhadap jenis usaha yang dapat memperoleh kredit tambahan modal usaha kecuali pembatasan lahan, pen depositoan uang di lembaga keuangan, produksi atau

penjualan obat-obatan terlarang, senjata dan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan, serta pembiayaan administrasi pemerintah.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengajukan kredit harus berdomisili di kelurahan sasaran (Demangan) dan memenuhi kriteria sebagai kelompok swadaya miskin. Penerima bantuan kredit wajib mengembalikan pinjaman modal usaha ini beserta bunganya. Dana yang dikembalikan merupakan dana bergulir yang menjadi hak KSM miskin lainnya di kelurahan yang sama. Masalahnya adalah bagaimana Pelaksanaan P2KP dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, serta tanggapannya setelah menerima bantuan dari proyek tersebut ?

Dengan demikian Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan program pemerintah pusat ini dimaksudkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah perkotaan. Dengan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ini diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di kelurahan Demangan dan dipadukan dengan program sektoral dan regional sehingga secara kolektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Mengacu latarbelakang masalah tersebut maka dapat kami rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Demangan Gondokusuman dalam mengentaskan kemiskinan ?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Demangan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya wacana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam dialektika kritis dengan wacana kontemporer lainnya. Sehingga dapat memiliki pemahaman tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang substansial, kontekstual, faktual dan aktual.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan acuan awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif didalam penelitian masalah yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang ada dalam penelitian ini.

b. Bagi P2KP Demangan Gondokusuman

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Demangan Gondokusuman dalam memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan di perkotaan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Demangan.
2. Mengetahui tanggapan dari masyarakat terhadap Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

F. Kerangka Teoritik

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah saatnya mendapat perhatian yang khusus untuk menuju masyarakat yang mandiri, otonom, mampu dan berdaya mengatasi krisis. Karena pembangunan dari dalam diri masyarakat itu sendirilah yang sebenarnya diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Maksudnya yaitu membangun potensi-potensi yang ada dalam diri masyarakat miskin dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang efektif sehingga menimbulkan kepercayaan diri dan membangkitkan kekuatan baru untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Istilah pemberdayaan dalam wacana pengembangan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Menurut Hary Hikmat,¹⁰ pemberdayaan dirumuskan sebagai

¹⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2001) hal.3

pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang.

Diliteratur pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang luas :

“Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang membangkitkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diantara politik secara lokal maupun nasional.”¹¹

Pengertian ini mengandung arti yang luas. Pemberdayaan dalam hal ini ditujukan untuk membangkitkan hak-hak orang-orang pinggiran yang tidak berdaya akan politik. Selama ini mereka selalu dijadikan alat oleh mereka para elit politik untuk memenuhi keinginan mereka akan tetapi mereka tidak diberikan hak-hak politiknya. Dalam pengertian ini mereka orang-orang pinggiran dibangkitkan mengenai hak-hak politiknya untuk bisa memberikan pengaruh baik lokal maupun nasional, tujuannya untuk mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan.

Pemberdayaan dalam titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga :

“Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.”¹²

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan untuk berubah namun akses untuk perubahan itu terkadang sulit didapatkan oleh orang-orang pinggiran atau miskin. Gianandjar Kartasasmita menjelaskan

¹¹ Ismawan Bambang, *Memahami dan Membina LSM*, Buletin Intern Bina Swadaya, No.8 Desember.1996 hal. 13

¹² Gianandjar Kartasasmita, *Op.Cit.* hal. 140

untuk memberdayakan masyarakat agar cepat berkembang perlu membangun daya yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Seringkali dalam pemberdayaan seorang pengembang tidak mengenali potensi yang dimiliki oleh warga sehingga pemberdayaan yang dijalankan tidak berhasil. Dalam hal ini masyarakat perlu didorong dan diberi motivasi tentang daya dan potensi yang dimiliki serta didorong untuk mengembangkannya. Dalam hal ini seorang pengembang hanya mengarahkan saja sementara masyarakat sendirilah yang menjalankannya.

Menurut Robert Chamber :

“Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum semua nilai-nilai sosial, yang mana konsep tersebut mencerminkan paradigma baru di dalam proses pembangunan.”¹³

Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chamber lebih tertuju pada pembangunan ekonomi ditekankan lagi pada pembangunan ekonomi yang membawa nilai-nilai sosial. Karena pada dasarnya mereka yang tidak berdaya, tidak berdaya secara ekonomi. Namun pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua aspek tidak hanya tertuju pada satu aspek saja baik ekonomi, sosial, politik maupun aspek yang lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendorong, membangun,

¹³ Sarman Mukhtar, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Bogor : P3R YAE, 1990) hal.25

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara individual sehingga dengan kesadaran penuh dapat mengembangkan potensinya.

Ada dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan, yakni pertama, pemberdayaan menekankan pada proses atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*Survival of the Fittes*). Proses ini lebih dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Kedua, pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kecenderungan kedua ini dalam proses pengembangan idenya mengandung muatan pemikiran mengenai kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pembangunan kota maka dikembangkan pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalan yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggi dalam masyarakat luas harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensi.

Dalam rangka itu, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

¹⁴ AMW.Pranarka dan Vidyandika Moelyarto, *Pemberdayaan Dalam Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta : CSIS, 1996) hal. 56

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang ada dimasyarakat berkembang, dengan titik tolaknya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada suatu kelompok masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang ada disuatu kelompok masyarakat dengan memberikan dorongan dan membangkitkan kesadaran untuk maju dengan bekal potensi yang telah di milikinya.

Kedua, memperkuat daya yang telah dimiliki. Dalam rangka itu diperlukan langkah-langkah lebih positif dengan menciptakan iklim dan suasana yang baik, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pengertian pula melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah lemah karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Dalam upaya pemberdayaan seorang pengembang masyarakat seyogyanya memperhatikan tiga hal di atas, agar upaya pemberdayaan yang dijalankan dapat membuahkan hasil yang berarti. Potensi yang ada dalam masyarakat harus digali secara terus menerus dan berupaya untuk menciptakan suasana yang mendukung untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Disamping itu seorang pengembang juga dapat melindungi masyarakat yang sedang

dikembangkan dengan meminta bantuan dari pihak atau lembaga lain jika memungkinkan. Karena seringkali masyarakat tidak berdaya jika dihadapkan dengan tekanan-tekanan yang merugikan masyarakat miskin, sehingga mereka masyarakat miskin menjadi lebih tidak berdaya lagi karena tidak mendapatkan perlindungan.

2. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Adalah program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar nantinya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. Untuk mewujudkan tujuan secara maksimal, diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah merupakan salah satu dimaksud. Pemberdayaan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat sebagai embrio atau pondasi bagi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat berfungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga lokal ini diharapkan dapat menjadi lembaga perantara untuk dapat menjangkau lembaga formal. Untuk mencapai maksud di atas, diperlukan partisipasi serta peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan P2KP untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Tujuan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) antara lain sebagai berikut :

- a. Mensukseskan pelaksanaan P2KP yang merupakan program pemerintah, melalui pendekatan pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan kelembagaan.
- b. Memberi legitimasi kepada para pelaku, antara lain ; konsultan, fasilitator kelurahan, KSM, kelompok sosial lainnya, dan masyarakat penerima bantuan.
- c. Menjadi wasit bila timbul persoalan-persoalan yang memerlukan fungsi penengah.
- d. Turut memberikan masukan dan mengendalikan, khususnya pembangunan fisik agar terintegrasi dengan rencana-rencana dan program pembangunan lainnya yang ada di daerah.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut :

- a. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
- b. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir I di atas.
- c. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui usaha bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.

- d. Penyiapan, pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
- e. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan melibatkan seluruh seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya harus terbuka untuk diperiksa. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan dibantu P2KP adalah KSM yang terdiri atas perorangan maupun keluarga miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, KSM-KSM ini akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kelurahan.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di laksanakan melalui strategi-strategi berikut :

- a. Penyelenggaraan konsep Tribina (Bina Sosial, Bina Ekonomi, Bina Lingkungan)
- b. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produksi
- c. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat memberikan peluang usaha baru

- d. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat di tumbuhkan atau diwujudkan
- e. Pendampingan pada kelompok swadaya masyarakat

Azaz Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

- a. Keadilan
- b. Kejujuran
- c. Kesejahteraan kaum laki-laki dan perempuan
- d. Kemitraan
- e. Kesederhanaan

Prinsip Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

- a. Demokrasi
- b. Partisipasi
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas
- e. Desentralisasi

3. Pengentasan Kemiskinan

Istilah pengentasan kemiskinan secara etimologis berasal dari kata entas yang dalam kamus Bahasa Indonesia kata entas, yang selanjutnya menjadi kata mengentaskan yang berarti mengangkat sesuatu dari tempatnya lalu memindahkan ke tempat lain.¹⁵ Bila di hubungkan dengan pengentasan kemiskinan berarti mengangkat orang miskin dari kehidupan melarat ke kehidupan yang lebih baik. Dari pengertian tersebut dapat di

¹⁵ Drs. Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern English Press, 1991) hal. 401

simpulkan bahwa pengentasan berarti suatu usaha untuk menyadarkan atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Sedangkan kemiskinan secara etimologi berasal dari kata miskin. Pengertian miskin didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak berharta, serba kekurangan, berpenghasilan rendah.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁷ kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kehidupan tersebut.

Parsudi Suparlan,¹⁸ mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Masalah kemiskinan memerlukan perhatian yang serius. Khusus menyangkut kemiskinan di perkotaan, persoalannya menjadi semakin kompleks. Apabila masyarakat masih dapat mengandalkan sebagian dari sumber pangannya dari alam dan tetangga sekitar, masyarakat kota cenderung tidak beruntung: mereka tidak mempunyai jaring pengaman sosial yang kuat. Lebih lanjut, persoalan kemiskinan di perkotaan juga menjadi semakin krusial ditangani terutama karena akses sosialnya yang luas seperti perudian, pelacuran, anak jalanan dan lain-lainnya.

¹⁶ *Ibid.* hal. 986.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) hal.

¹⁸ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta : YOI, 1995) hal.XI

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berpijak pada konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada perlunya penanggulangan kemiskinan yang dikerangkakan pada penguatan masyarakat sipil dan partisipasi penuh masyarakat.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menekankan pada pentingnya proses pembangunan kapasitas institusi local sebagai inti penggerak sekaligus agen sosial pembangunan di masing-masing komunitas. Melalui pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) program P2KP mencoba membangun dan memperkuat institusi komunitas atau masyarakat lokal, agar dalam jangka panjang dapat menjadi agen perubahan sosial masyarakat yang efektif. P2KP dirancang dengan mencoba mengembangkan apa yang disebut sebagai modal sosial komunitas, agar dalam jangka panjang mampu menjadi penggerak komunitas masyarakat khususnya masyarakat Demangan.¹⁹

Dengan adanya program pengentasan kemiskinan oleh P2KP diharapkan dapat mengangkat derajat masyarakat miskin khususnya kelurahan Demangan. Sehingga jumlah masyarakat miskin menjadi

¹⁹ Buku Panduan P2KP : 1999, Hal. 14

berkurang dan mereka mampu berdaya dalam menghadapi permasalahan khususnya ekonomi.

4. Partisipasi Masyarakat

Usaha pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa adanya usaha peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap program pembangunan.

Menurut Muljarto Tjokrowinoto partisipasi adalah sebagai berikut:

“Partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir atau perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut.”²⁰

Partisipasi dalam hal ini yakni ikut serta seseorang dalam suatu kegiatan kelompok dalam masyarakat baik mental maupun fisik untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. Disamping itu dalam partisipasi seseorang diberi kesempatan untuk menyumbangkan daya pikirnya untuk kemajuan kelompok organisasi dan ikut bertanggungjawab.

Menurut Mubyarto :

“Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu keberhasilannya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.”²¹

Mubyarto mendefinisikan partisipasi tidak hanya penyertaan mental dan fisik untuk kemajuan organisasi, namun juga tentang kesediaan seseorang untuk membantu organisasi kelompoknya untuk mencapai keberhasilan dalam setiap program yang diagendakan.

²⁰ Muljarto Tjokrowinoto, *Beberapa Teknik Dalam Hubungan Kerja* (Yogyakarta : BPA, 1997) hal. 2

²¹ Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan* (Yogyakarta : BPEF, 1988) hal.

Partisipasi dalam hal ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kelonggaran waktu yang dimiliki tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi.

Margono Slamet berpendapat:

“Partisipasi diartikan sebagai ikut serta ambil bagian dalam suatu kegiatan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil yang dicapai dengan persyaratan mesti adanya kemampuan dan kesempatan pada individu yang bersangkutan.”²²

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di ambil kesimpulan:

Pertama, bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih daripada sekedar keterlibatan fisik saja. Kedua, kesediaan partisipasi memberi sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ketiga, unsur tanggungjawab yang merupakan segi yang mempunyai rasa menjadi anggota.

Partisipasi dapat di katakan sebagai suatu reaksi terhadap adanya stimulan yang diberikan dari luar. Sebelum melakukan tindakan berupa partisipasi dalam kegiatan, individu menggunakan pikiran (*Mind*) untuk memberikan makna terhadap stimulan yang diberikan. Partisipasi terjadi ketika kelompok sasaran memberikan makna yang positif terhadap program yang akan dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Weber bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang mengandung makna

²² Margono Slamet, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan* (Bandung : lumni,1988) hal.35.

subyektif yang meliputi pengaruh positif dari situasi dan diarahkan pada orang lain.²³

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan suatu aktifitas untuk mempengaruhinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan adalah melalui proses sosialisasi program. Proses sosialisasi merupakan proses awal dari pelaksanaan suatu program dan memerlukan waktu yang cukup lama agar kelompok sasaran dapat memahami secara mendalam tentang apa yang harus dilakukannya dalam pelaksanaan program. Proses ini memakan banyak waktu karena sebagian besar dari sosialisasi merupakan proses belajar serta penyesuaian diri yang sedikit banyak bersifat rutin, yang memungkinkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan dan diperolehnya suatu persepsi mengenai diri serta pengaruh luar.²⁴

Dalam proses sosialisasi ini diperlukan adanya interaksi antara petugas pelaksana program dan masyarakat sasaran. Interaksi sosial adalah bentuk-bentuk yang tampak apabila orang-perorangan atau kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain terutama dengan menengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial.²⁵

Interaksi sosial ini dapat terjadi dengan adanya dua syarat. Pertama, adanya kontak sosial (*Social Contact*). Kontak sosial ini dapat

²³ George Ritzer Dalam Alimanda, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta : Rajawali Pers, 1992) hal. 45

²⁴ Sunarto, *Pengantar Sosiologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta : YOI, 1985) hal. 175

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hal. 60.

berlangsung dalam tiga bentuk yaitu : antara orang-perorangan, antara orang-perorangan dengan suatu kelompok, dan antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kedua, adanya komunikasi (*Communication*). Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badan atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan tertentu yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.²⁶

Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.²⁷

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode yang mendukung. Adapun metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat untuk memperoleh keterangan, menurut Suharsini Arikunto subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber penelitian.²⁸

²⁶ Anton H. Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1986) hal.6

²⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) hal. 14

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 90

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah individu yang dijadikan informan atau merupakan key person (orang kunci) di P2KP Demangan dan anggota KSM. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala P2KP Demangan yaitu.Suratman Efendi
- b. Sekretaris P2KP Demangan yaitu Sutanto Ilyas
- c. Aparat pemerintahan Demangan/kepala kelurahan yaitu CHR.Kris Susetyo
- d. Anggota P2KP yang tergabung dalam KSM

2. Penentuan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dalam mengentaskan kemiskinan yang meliputi : Pertama, penyaluran dana, penentuan kelompok dan persyaratan mendapatkan pinjaman. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Demangan yang meliputi : setrategi, bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat miskin Demangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Supaya memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

a. Interview

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.²⁹ Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya

²⁹ P. Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Remaja Rosda, 1993) hal.7

komunikasi ini dilakukan dalam keadaan berhadapan, namun komunikasi ini juga dapat melalui telepon.³⁰

Teknik yang digunakan dalam interview ini adalah interview bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi dengan berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Sedangkan dalam metode interview ini, sumber informasi yang diinterview adalah pengurus P2KP dan anggota P2KP. Metode ini digunakan untuk menghimpun data tentang pelaksanaan P2KP, penyaluran dana, prosedur peminjaman dana, dan partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan P2KP.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan artinya peneliti dalam pengamatannya terhadap obyek penelitian tidak terlibat secara langsung.³² Dalam penelitian ini penulis sebagai observatory non partisipan yang berada diluar situasi yang sedang diobservasi, metode ini digunakan untuk proses pengumpulan data khususnya yang menyangkut tentang proses pelaksanaan P2KP Demangan.

c. Dokumentasi

³⁰ Nasution, *Metode Reseach* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hal.113

³¹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Melton Putra, 1992) hal. 120

³² Sutrsno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan UGM, 1980) hal. 136

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain: catatan buku, peraturan, perundang-undangan dan lain sebagainya.³³ Cara ini di gunakan untuk memperoleh data sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, foto dan laporan tertulis. Kaitannya dengan penelitian ini metode dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data-data tentang kondisi geografis, kondisi social ekonomi, kondisi keagamaan, keadaan pendidikan di wilayah kelurahan Demangan Gondokusuman melalui instansi yang ada di kelurahan Demangan.

4. Metode Pemeriksaan Data

Menurut Lexy J. Moeloeng, teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³⁴ Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan triangulasi sumber.

Teknik triangulasi sumber tersebut dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, misalnya; dengan jalan membandingkan apa yang dikatakan key person dengan apa yang dikatakan oleh anggota KSM, atau dengan

³³ *Op. Cit.* hal. 202

³⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Kerta Karya, 1998) hal. 178

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Menurut Moleong,³⁵ langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merangkum data, dipilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari pola dan temanya dan selanjutnya dilakukan dengan membuat abstraksi.

b. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini yakni menguraikan mengenai pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam mengentaskan kemiskinan dan hasil yang di capai dalam pelaksanaan P2KP. Pendeskripsian ini dilakukan berdasarkan apa yang dilihat atau diperoleh selama penelitian.

c. Pengambilan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan di susun, selanjutnya dibuat kesimpulan. Ketiga langkah dalam menganalisis data tersebut menjadi acuan dalam menganalisis data-data penelitian sehingga dapat tercapai suatu uraian sistematis, akurat dan jelas.

³⁵ *Ibid.* hal. 178

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan serta melihat uraian hasil penelitian mengenai pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyaluran dana dari BKM ke KSM adalah melalui proposal usulan kegiatan yang diajukan dari anggota KSM ke BKM. Pencairan dana oleh BKM dapat terlaksana apabila usulan-usulan kegiatan dari KSM telah diterima oleh BKM, dan dana langsung dikucurkan.
2. Ada beberapa kriteria bagi masyarakat yang berhak menjadi anggota kelompok KSM yaitu :
 - a. Status kependudukan
 - b. Faktor pekerjaan
 - c. Faktor jumlah tanggungan
 - d. Faktor penguasaan rumah
 - e. Faktor kondisi rumah/tempat tinggal
3. Ada beberapa persyaratan bagi masyarakat Demangan untuk mendapatkan pinjaman dana yaitu :
 - a. Warga kelurahan Demangan, dengan menunjukkan kartu identitas yaitu KTP kelurahan Demangan. Diutamakan warga yang

- mempunyai kriteria miskin dan sudah mempunyai usaha baik kecil maupun menengah.
- b. Membentuk kelompok KSM dengan jumlah anggota minimal 3 (Tiga) orang.
 - c. Mengambil blangko proposal di kantor BKM Demangan, dengan diketuai oleh ketua RT/RW atau tokoh setempat.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin Demangan dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain : a). Penyelenggaraan konsep Tribina (bina sosial, bina ekonomi dan bina lingkungan). b). Pemberian dana pinjaman bergulir untuk odal kerja kegiatan produktif. c). Peningkatan partisipatif aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan. d). Pendampingan pada KSM.
 5. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM Demangan meliputi pemberdayaan BKM dan KSM. Bentuk pemberdayaan BKM yaitu : a. mengikutsertakan pengurus/anggota dalam setiap pelatihan-pelatihan. b. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BRI dan lembaga sosial lainnya dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan. c. Mengadakan rapat pengurus. Sementara bentuk pemberdayaan terhadap KSM meliputi : a. pendampingan KSM. b. Pelatihan manajemen KSM seperti manajemen usaha dan keuangan. c. Membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh KSM.
 6. Pengurus dan masyarakat dituntut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program P2KP. Wujud dari partisipasi masyarakat miskin Demangan

adalah menghadiri rapat yang diadakan oleh BKM, menghadiri pelatihan dan mengangsur pengembalian pinjaman setiap bulan.

B. SARAN-SARAN

1. Masih ada sebagian anggota KSM baik lama maupun baru yang usahanya masih jalan ditempat. BKM Demangan untuk terus melakukan pendampingan kepada anggota-anggota KSM-KSM baru maupun lama. Agar usaha yang dijalankan mereka tetap lancar dan mandiri.
2. Sebagian anggota KSM masih beranggapan bahwa dana yang dipinjamkan adalah pemberian dari pemerintah sehingga pengembaliannya tersendat. Untuk itu Pengurus BKM untuk memberikan pengarahan secara terus menerus kepada anggota KSM bahwa dana yang dipinjam adalah milik bersama. Agar mereka anggota KSM aktif dalam mengembalikan dana pinjaman, sehingga dapat dipinjamkan kembali secara bergulir kepada masyarakat miskin Demangan.
3. Banyak anggota yang kurang berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM. Anggota KSM untuk terus berperan aktif dalam pemberdayaan yang dilakukan BKM dalam meningkatkan keswadayaan sehingga dapat terwujud ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Melton Putra, 1992.
- Asy'ari, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- AMW. Pranarka dan Vindyandika Moelyarto, *Pemberdayaan Dalam Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS, 1996
- Bambang, Ismawan, *Memahami dan Membina LSM*, Buletin Intern Bina Swadaya, No, 8 Desember 1996.
- Bappenas, *Buku Panduan P2KP* Jakarta, 1999
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2001
- H. Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : CIDES, 1996.
- L.J.Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mukhtar, Sarman, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Bogor : P3R YAE, 1990.
- Moelyanto, Vidhyandika, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT*, Jakarta : CSIS, 1996.
- Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta : BPEF, 1988.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Ritzer, George Dalam Alimanda, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Salim, Peter, Yenny Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Slamet, Margono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Masyarakat Pedesaan*, Bandung: Alumni, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Subagyo, P. Jogo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, : Rajawali Prosda, 1993.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunarto, *Pengantar Sosiologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : YOI, 1985.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : YOI, 1995.
- Sutijat, Sumardi, *Geografi I Untuk Sekolah Menengah Umum*, Jakarta : Depdikbud, 1996.
- Strisno, Lukman, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- Tjokrowinoto, Muljarto, *Beberapa Teknik Dalam Hubungan Kerja*, Yogyakarta : BPA, 1997.